

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistika (BPS) menyatakan bahwa 9,26 juta jiwa (8,14%) angkatan kerja Indonesia menganggur pada Januari 2013 dan sebagian diantaranya adalah masyarakat terdidik berpendidikan setingkat SLTA dan perguruan tinggi yang jumlahnya mencapai 4,5 juta orang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Tingginya angka pengangguran dan sangat terbatasnya lapangan kerja yang ada, nampaknya belum mampu menyadarkan dan menggugah dunia pendidikan untuk mengubah orientasinya. Publikasi hasil analisis data dari Dirjen Dikti Kemendiknas RI pada banyak kesempatan menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan di Indonesia ternyata tidak secara linier berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi. Lebih dari itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang di Indonesia, semakin rendah tingkat kemandirian dan jiwa kewirausahaannya (Dikti, 2013).

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Tujuan tersebut harus menjadi acuan utama bagi semua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar lulusan SMK setelah selesai mengenyam pendidikan harus memiliki kemampuan vokasional yang lebih baik dibandingkan dengan lulusan SMA. Dengan demikian, proses pembelajaran di SMK menuntut adanya kekhasan tertentu yang berbeda dengan proses pembelajaran di SMA yang tujuan utamanya bukan untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke dunia kerja.

Menurut *American Vocational Association* (dalam Wena, 1996:1), pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai “...*education designed to develop skill, abilities, understandings, attitudes, work habits, and appreciations needed by*

Endang Supardi, 2015

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*workers to enter and make progress in employment on useful and productive basis.”* Berpijak pada uraian tentang konsepsi pendidikan kejuruan tersebut, secara jelas nampak terdapat kaitan yang sangat erat antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Pendidikan kejuruan dapat dikatakan sebagai jembatan masyarakat dan dunia kerja.

Dalam mencapai visi dan misi SMK, kebijakan yang dilaksanakan adalah pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang terdiri atas Standar Isi, Standar Peserta Didik, Standar Pendidik dan Tendik, Standar Sarpras, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian. Dampak yang diharapkan dari terlaksananya pemenuhan SNP di SMK adalah kebijakan “BMW”, yaitu Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha. Dengan kata lain, lulusan SMK, selain diharapkan dapat bekerja, lulusan juga dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan dapat berwirausaha.

Terkait dengan itu, prioritas kebijakan di SMK saat ini adalah: (1) Pengembangan guru yang profesional, (2) Kecukupan alat-alat praktik yang relevan, dan (3) Kecukupan bahan-bahan praktik untuk pencapaian standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, Sugiyono (2013: 34) mengungkapkan kebijakan pengembangan SMK adalah pembuatan Undang-Undang tentang Pendidikan Kejuruan, Pemerintah membangun sektor produksi sehingga tercipta lapangan kerja yang banyak, Pembangunan BPLPT di setiap Provinsi atau Eks Karesidenan untuk praktik SMK yang belum mempunyai sarana prasarana yang lengkap, Peningkatan ketercapaian standar nasional pendidikan, khususnya pada guru produktif, alat-alat dan bahan praktik, dan pusat informasi lapangan kerja bagi lulusan SMK secara lokal, nasional dan internasional.

Untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat, prioritas bidang pendidikan dan pembinaan SMK dijabarkan ke dalam 5 (lima) aspek

utama (Wijanarka, 2012: 2), yaitu: akses pendidikan dasar-menengah, metodologi, pengelolaan, kurikulum, dan kualitas.

Pada substansi akses pendidikan dasar-menengah, ditargetkan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan setingkat SMA (SMK, SMA, MA) dari 69% tahun 2009 menjadi 85% pada tahun 2014, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2014 dan penyediaan sambungan internet berisi materi pendidikan di sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya tahun 2014. Pada substansi metodologi, penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), akan tetapi pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti, kecintaan terhadap budaya dan bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2012 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah yang diterapkan di 25% sekolah pada tahun 2012 dan 100% pada tahun 2014. Substansi pengelolaan diarahkan pada pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong pengaktifan peran komite sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan dewan pendidikan di tingkat Kabupaten. Substansi kurikulum diarahkan pada penataan ulang/ pengembangan kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*). Substansi kualitas, diarahkan pada penyiapan dokumen mutu untuk sertifikasi ISO 9001:2008, pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SPN), serta peningkatan kompetensi lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.

Secara ideal, dengan mengikuti prinsip “BMW” (Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha), diharapkan sekitar 30 – 70% lulusan dapat bekerja atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau menjalankan wirausaha.

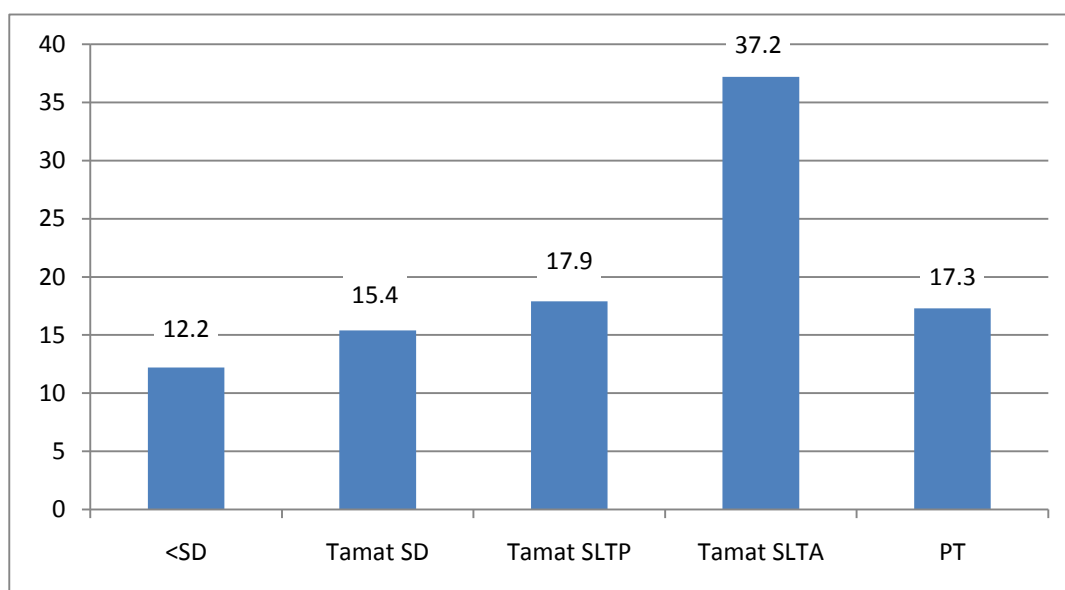
Endang Supardi, 2015

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sisanya dapat merupakan kombinasi dari itu, yaitu bekerja sambil melanjutkan ke pendidikan tinggi dan menjalankan wirausaha. Dalam hal ini, aspek wirausaha menjadi primadona dalam BMW.

Di sisi lain, masalah pengangguran masih merupakan salah satu masalah serius yang erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Hal ini bukan hanya berkaitan erat dengan lembaga pendidikan melainkan pula erat kaitannya dengan kemajuan dan kemakmuran suatu negara. Data berikut menunjukkan jumlah angka pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.



*Sumber: Dokumen Badan Pusat Statistik Nasional, 2014*

**Gambar 1.1**  
**Persentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi**  
**Tahun 2014**

Data tersebut menunjukkan bahwa pengangguran yang paling tinggi terjadi pada penduduk dengan jenjang pendidikan tertinggi Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA). Di SLTA, para pelajar dididik untuk siap bekerja dan dibekali pula dengan kemandirian. Di satu pihak, SMK diklaim menjadi salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran yang berpendidikan. Namun, pihak lain menilai bahwa pola pembentukan SMK di Indonesia lebih berbasis pada kuantitas

dan kurang memperhatikan mutunya. Jika demikian, maka kondisi ini tentu perlu segera diperbaiki agar tidak semakin meruncing dan berdampak lebih parah pada pengangguran yang akan semakin meningkat dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jika telah tertanggulangi dengan baik, tentu akan berdampak positif pada lulusan SMK yang benar-benar siap bekerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebut didukung pula dengan data yang menunjukkan penyerapan lulusan SMK yang relatif masih rendah dan tingginya tingkat pengangguran menurut jenjang pendidikan masih tinggi.

**Tabel 1.1**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja**  
**Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan, 2013-2014**  
**(juta orang)**

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013		2014	
		Feb	Agust	Feb	Agust
1	Sekolah Dasar ke Bawah	55,12	54,18	55,51	53,88
2	Sekolah Menengah Pertama	21,22	20,70	20,29	20,22
3	Sekolah Menengah Atas	16,35	17,11	17,20	17,25
4	Sekolah Menengah Kejuruan	9,73	8,86	9,43	9,50
5	Diploma I/II/III	3,32	3,17	3,12	2,97
6	Perguruan Tinggi	5,54	5,65	7,25	6,98
<b>Jumlah</b>		<b>111,28</b>	<b>109,67</b>	<b>112,80</b>	<b>110,80</b>

*Sumber: Dokumen Badan Pusat Statistik Nasional, 2014*

Catatan: Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2013-2014 untuk SMK Bidang Keahlian Bisnis Manajemen di Kota Bandung relatif lebih rendah, yaitu untuk tahun 2013 bulan Februari adalah sebesar 9,21 dan Agustus sebesar 8,83, sedangkan untuk tahun 2014 bulan Februari adalah 9,18 dan Agustus sebesar 8,94.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam setahun terakhir (Agustus 2013-Agustus 2014) jumlah penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk Sekolah Dasar (SD) ke bawah, Sekolah

Endang Supardi, 2015

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menengah Pertama (SMP), dan Diploma I/II/III mengalami penurunan. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan. Berikut ini adalah data mengenai jumlah pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2013 -2014**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013		2014	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SD ke bawah	3,37%	3,56%	3,69%	3,64%
Sekolah Menengah Pertama	7,83%	8,37%	7,80%	7,76%
Sekolah Menengah Atas	12,17%	10,66%	10,34%	9,60%
Sekolah Menengah Kejuruan	10,00%	10,43%	9,51%	9,87%
Diploma I/II/III	11,59%	7,16%	7,50%	6,21%
Universitas	9,95%	8,02%	6,95%	5,91%

Sumber: Dokumen Badan Pusat Statistik Nasional, diakses 2013

Berdasarkan tabel di atas, angka pengangguran terbuka dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2013 bulan Februari sebanyak 10,00% dan pada bulan Agustus tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 0,43% menjadi 10,43%, dan pada tahun 2014 bulan Februari terjadi penurunan sebanyak 0,92% menjadi 9,51% dan pada bulan Agustus tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 0,36% menjadi 9,87%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, namun jumlah 9,87% masih merupakan jumlah pengangguran yang cukup tinggi untuk SMK.

Faktor penyebab lainnya adalah, karena sebagian besar lulusan pendidikan di Indonesia masih berorientasi sebagai pencari kerja (*job seeker*) dari pada sebagai pencipta kerja (*job creator*). Hal ini terjadi karena sistem pembelajaran

Endang Supardi, 2015

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang dikembangkan oleh dunia pendidikan Indonesia masih terfokus pada bagaimana menyiapkan peserta didik lulus dan mendapatkan pekerjaan, bukannya lulusan yang siap menciptakan pekerjaan. Dirjen Dikti Kemendiknas menyatakan, bahwa proses pendidikan kurang menyentuh persoalan-persoalan nyata di dalam masyarakat. Satuan pendidikan belum bisa menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi di dalam keterbatasan dan berdaya juang di dalam tekanan.

Indikasi dari realitas tersebut adalah banyaknya lulusan yang walaupun berpengetahuan tinggi tetapi kurang mampu menyejahterakan diri dan lingkungannya. Oleh karena itu satuan pendidikan di Indonesia perlu lebih menyiapkan lulusannya menjadi lulusan yang mampu hidup mandiri, berkreasi, memanfaatkan sains dan teknologi serta seni yang telah dipelajarinya.

Demikian halnya dengan sekolah menengah kejuruan (SMK), para pelajar SMK di Indonesia didorong mampu berwirausaha di tengah minimnya lapangan pekerjaan, yang sejak tahun 1994 Departemen Pendidikan Nasional menerapkan standarisasi kurikulum pada seluruh SMK di Indonesia, yaitu harus menerapkan kurikulum mata pelajaran kewirausahaan. Tujuannya adalah memberikan ruang untuk pendidikan yang dapat mendorong kewirausahaan. Dalam kurikulum mata pelajaran kewirausahaan di SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen, standar kompetensi untuk kelas XII adalah Mengelola Usaha Kecil. Kompetensi dasar yang dituntut adalah (1) mempersiapkan pendirian usaha, (2) menghitung risiko menjalankan usaha, (3) menjalankan usaha kecil, dan (4) mengevaluasi dan mengembangkan usaha (Silabus SMK, 2014). Materi pembelajaran kewirausahaan di sini antara lain adalah: petunjuk teknik pengurusan surat ijin usaha perusahaan, dokumen-dokumen untuk mengurus surat ijin usaha, petunjuk teknik cara memperoleh modal usaha, mencari, memilih, dan menetapkan tempat usaha serta kebutuhan peralatan, mempersiapkan fasilitas dan bahan baku, merekrut dan menempatkan SDM, menyusun struktur organisasi, menempatkan orang-orang dalam organisasi, penggunaan sumber-sumber tenaga kerja, mempersiapkan administrasi usaha. Selain itu, siswa juga diberi materi mengenai analisis data dengan menggunakan pendekatan statistik seperti peluang, regresi,

Endang Supardi, 2015

*PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan korelasi (keuangan, potensi dasar, produk, pelanggan, pesaing, bahan baku/bahan produk), mengelola fasilitas dan bahan, mengelola SDM, mengelola proses produksi, mengelola keuangan, mengelola administrasi, memasarkan produk dan jasa, dan menyusun strategi yang sistematis untuk menjalankan usaha. Materi-materi seperti struktur kekayaan dan finansial, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas/profitabilitas, teknik penyusunan laporan, dan menyusun rencana pengembangan usaha juga dipelajari.

SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen terdiri atas program studi Keuangan, Administrasi Perkantoran, dan Pemasaran. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mutu proses pembelajaran Kewirausahaan, pada tahun 2004, pemerintah meluncurkan program *blockgrant* khusus untuk peningkatan kompetensi wirausaha melalui pembangunan kelas wirausaha di 150 lokasi atau sekitar 450 SMK di Indonesia. Berangkat dari kebijakan pemerintah dan perlunya pemahaman yang komprehensif tentang pembelajaran kewirausahaan, para pengelola sekolah, khususnya kepala SMK perlu mengelola pengembangan kompetensi kewirausahaan siswa di sekolah secara baik. Kepemimpinan Kepala SMK dapat mendorong komponen-komponen pendidikan lainnya di tingkat sekolah agar dapat memperoleh output hasil pembelajaran, khususnya hasil pembelajaran kewirausahaan yang bermutu.

Pengembangan kompetensi kewirausahaan siswa perlu dikelola dengan manajemen proses pembelajaran yang baik di setiap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan. Colby & Witt (2000: 4) menyatakan bahwa proses pembelajaran di kelas melibatkan interaksi antara:

- (1) peserta didik (siswa) dan pendidik (guru) sebagai pembelajar (*learners*) sebagai komponen utama pembelajaran;
- (2) lingkungan internal sekolah, termasuk iklim dan budaya sekolah serta sarana dan prasarana sekolah,
- (3) isi, yang tercermin dari kurikulum, materi pelajaran, dan standar;
- (4) proses pembelajaran, yang di dalamnya peserta didik, pendidik, dan administrator serta sumber daya lainnya melakukan interaksi, dan
- (5) hasil (*outcome*) pendidikan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menghasilkan lulusan yang kompeten terkait dengan tujuan pendidikan nasional dan partisipasinya di dalam masyarakat.

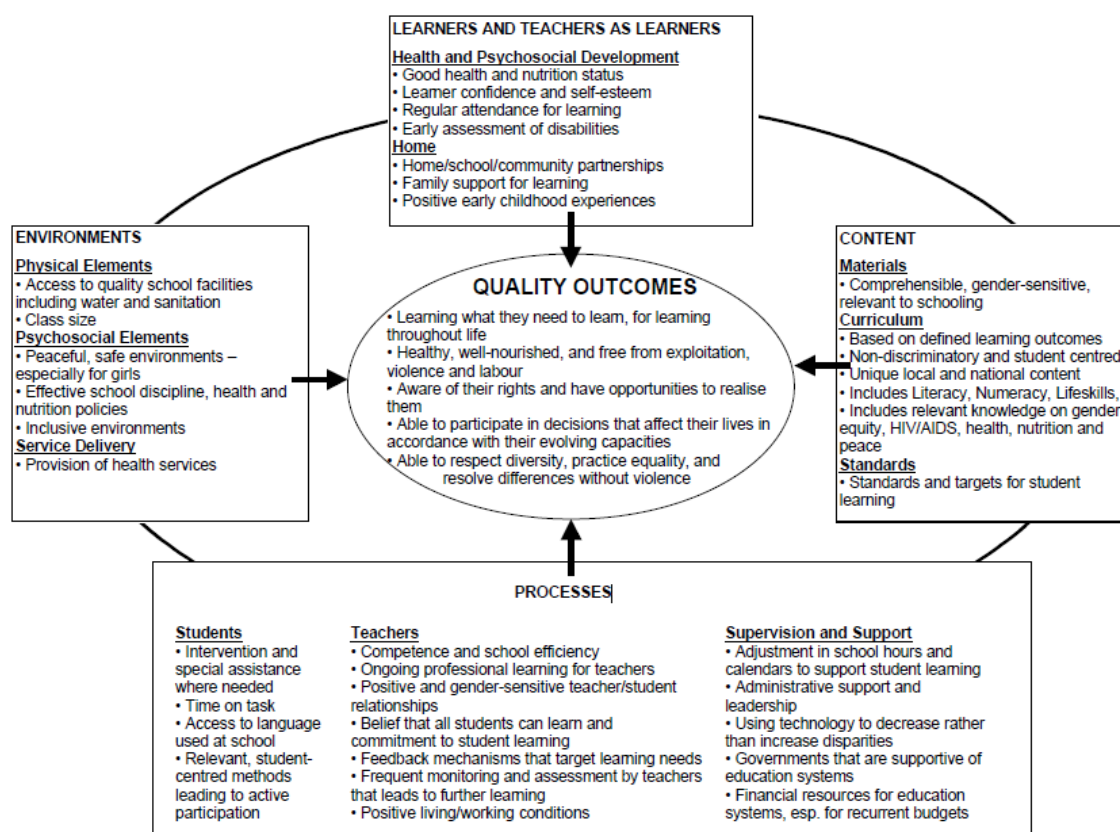
Endang Supardi, 2015

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Dalam hal ini, mutu proses pembelajaran merupakan suatu kondisi ideal dalam proses pendidikan di sekolah yang sesuai atau melebihi harapan *stakeholder*, yang mencakup komponen peserta didik dan pendidik, lingkungan internal dan eksternal sekolah, kurikulum, dukungan administrator, sarana-prasarana, pembiayaan, dan *outcome* yang bermutu, seperti digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1.2**  
**Mutu Proses Pembelajaran di Sekolah**  
 Sumber: Colby & Witt (2000: 30)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai atau melebihi harapan, proses pembelajaran harus bermutu, dan agar bermutu, proses pembelajaran perlu dikelola dengan baik oleh kepala sekolah dan guru, dengan ditunjang oleh lingkungan (iklim sekolah) dan komponen pendukung lainnya, sehingga dapat menghasilkan output berupa kompetensi siswa sesuai tujuan dan harapan. Dalam hal ini, proses pembelajaran kewirausahaan di SMK harus

Endang Supardi, 2015

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bermutu dan harus dikelola dengan manajemen motivasi belajar siswa, yang tidak terlepas dari kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah (yang diterapkan di dalam maupun di luar kelas), sehingga dapat berimplikasi pada Kompetensi Kewirausahaan Siswa SMK.

Berdasarkan pengamatan secara empirik terhadap manajemen Kompetensi Kewirausahaan Siswa di SMK dan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa, peneliti bermaksud mengkaji masalah ini yang dituangkan dalam judul disertasi: **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Perilaku Kewirausahaan Guru, Iklim Sekolah, dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Inti kajian dalam penelitian ini adalah Kompetensi Kewirausahaan Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung. Kompetensi Kewirausahaan Siswa SMK yang belum memenuhi standar atau harapan perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan peserta didik terjun ke dunia kerja, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan menjalankan wirausaha. Kompetensi Kewirausahaan Siswa ini merupakan hasil dari pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa. Semua itu berdampak positif terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa SMK itu sendiri secara teoretis maupun empiris tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi Kewirausahaan Siswa, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, dapat diajukan rumusan masalah yang terungkap dalam pertanyaan penelitian (*research question*) utama yaitu “Apakah Kompetensi Kewirausahaan Siswa SMK dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan

Endang Supardi, 2015

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

motivasi belajar siswa”. Pertanyaan penelitian tersebut dapat diuraikan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran Kompetensi Kewirausahaan Siswa, kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa.
2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap perilaku kewirausahaan guru.
3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap iklim sekolah.
4. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi belajar siswa.
5. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa, pada SMK Bidang keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung.
  - a. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa.
  - b. Bagaimana pengaruh perilaku kewirausahaan guru terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa.
  - c. Bagaimana pengaruh iklim sekolah terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa.
  - d. Bagaimana pengaruh motivasi belajar siswa terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum diharapkan memperoleh fakta empirik hasil dari analisis mengenai struktur hubungan variabel-variabel yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Kompetensi Kewirausahaan Siswa, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan

Endang Supardi, 2015

*PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

motivasi belajar siswa. Sedangkan tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran Kompetensi Kewirausahaan Siswa, kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa.
2. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap perilaku kewirausahaan guru.
3. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap iklim sekolah.
4. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi belajar siswa.
5. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel tentang kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa pada SMK Bidang keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung.
  - a. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa.
  - b. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel tentang pengaruh perilaku kewirausahaan guru terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa.
  - c. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel tentang pengaruh iklim sekolah terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa.
  - d. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel tentang pengaruh motivasi belajar siswa terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoretis (positif) maupun secara praktis (normatif).

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Endang Supardi, 2015

*PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan ilmu dan penelitian dalam bidang disiplin ilmu administrasi pendidikan, serta memperkaya bukti-bukti empiris terutama berkenaan dengan:

- a. Pengembangan teori Kompetensi Kewirausahaan Siswa, kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa.
- b. Memperluas kajian motivasi belajar siswa, terutama yang berhubungan dengan kausalitas antara konstruk-konstruk Kompetensi Kewirausahaan Siswa, kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa.

## 2. Kegunaan Operasional

- a. Bagi pihak manajemen di lingkungan sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa di SMK, Bidang keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung
- b. Bagi Program Studi Administrasi/Manajemen Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menentukan kebijakan dan program pendidikan kewirausahaan yang efektif.

## E. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini disusun dalam lima bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi.

Bab II merupakan kajian pustaka dan kerangka penelitian yang mendeskripsikan beberapa konsep, teori dan pendekatan yang berkaitan dengan Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan Siswa, kepemimpinan kepala sekolah, perilaku kewirausahaan guru, iklim sekolah, dan motivasi belajar siswa, diikuti dengan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Endang Supardi, 2015

*PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERILAKU KEWIRAUSAHAAN GURU, IKLIM SEKOLAH, DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang mencakup metode penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV menyajikan hasil penilaian dan pembahasan yang merupakan deskripsi dari temuan yang didapatkan dari penelitian di lapangan dan membahas hasilnya sesuai dengan konsep yang ada.

Terakhir, Bab V merupakan bab penutup yang terdiri atas simpulan, implikasi penelitian dan rekomendasi.